



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PERHUBUNGAN



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2021 - 2026

Jalan Gajah Mada 116 Praya

Website: perhubungan.lomboktengahkab.go.id

E-mail: dishub.lomboktengahkab@gmail.com

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DINAS PERHUBUNGAN



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2021 - 2026

2021

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021–2026 disusun sebagai wujud penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021–2026 guna menyediakan suatu tolok ukur dengan memperhatikan indikator dan sasaran kinerja sehingga dapat dilakukan evaluasi kinerja tahunan.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah diharapkan mampu menghadapi perkembangan pesat pembangunan yang akan terjadi di Kabupaten Lombok Tengah dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik antara lain efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Rencana Strategis ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan, serta penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah.

Praya, 8 September 2021

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lombok Tengah,



H. SUPARDAN, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19691122 199203 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
KATA GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT	
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	8
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	11
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	14
2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah.....	29

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	32
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	34
3.3. Telaahan Rensrta K/L dan Renstra Provinsi.....	37
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	42
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	45
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	47
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	48
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	51
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	60
BAB VIII PENUTUP	61
LAMPIRAN	62

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data PNS menurut Jenis Kelamin dan Golongan Pangkat Th. 2020	11
Tabel 2.2	Data PNS menurut Tingkat Pendidikan Th. 2020	12
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Non PNS Dinas Perhubungan	12
Tabel 2.4	Jumlah Sarana dan Prasarana pada Dinas Perhubungan.....	13
Tabel 2.6	Capaian Indikator Angka Kecelakaan Lalu Lintas	17
Tabel 2.7	Capaian Indikator Penyediaan Fasilitas Keselamatan Jalan pada Jalan Kabupaten.....	19
Tabel 2.8	Capaian Indikator Jumlah Pengendalian Arus Lalu Lintas.....	19
Tabel 2.9	Capaian Indikator Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.....	20
Tabel 2.10	Capaian Indikator Jumlah Kendaraan yang Lulus Uji	21
Tabel 2.11	Load Factor (LF) Statis di Kabupaten Lombok Tengah.....	22
Tabel 2.12	Load Factor (LF) Dinamis di Kabupaten Lombok Tengah.....	22
Tabel 2.13	Capaian Indikator Pengendalian dan Penertiban Ijin Angkutan.....	24
Tabel 2.14	Capaian Indikator Rekomendasi Perijinan di Bidang Perhubungan...	24
Tabel 2.15	Capaian Indikator Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi..	25
Tabel 2.16	Capaian Indikator Penertiban Parkir dan Terminal.....	26

Tabel 2.17	Capaian Indikator Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan.....	26
Tabel 2.18	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perhubungan.....	28
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan dan Prioritas Sasaran Pembangunan	33
Tabel 3.2	Identifikasi Isu-isu Strategis Lingkungan Eksternal.....	34
Tabel 3.3	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	36
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perhubungan	39
Tabel 3.5	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	41
Tabel 3.6	Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	42
Tabel 3.7	Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Kab. Lombok Tengah.....	44
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran.....	47

Tabel 5.1	Analisis SWOT.....	49
Tabel 5.2	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan.....	50
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Rencana Pendanaan Dinas Perhubungan.....	52
Tabel 7.1	Perumusan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Gambar Struktur Organisasi Dinas Perhubungan	10
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Bagan Alir Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 - 2026	63
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan. Untuk itu, sebagai salah satu perangkat daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu lima tahunan sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 dan dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 1, Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun

yang berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 – 2026 ini disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan urusan perhubungan baik internal maupun eksternal yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah. Penyusunan Renstra dilakukan dengan berpedoman pada Pasal 261 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratik (strategis), partisipatif, politis, serta perencanaan *bottom-up* dan *top-down* yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendekatan teknokratik (strategis) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
2. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
3. Pendekatan politis dilakukan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih;
4. Pendekatan perencanaan *bottom-up* dan *top-down* merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, hingga nasional.

Proses penyusunan Rencana Strategis ini telah melalui beberapa tahapan mulai dari penetapan tim penyusun Renstra melalui Surat Keputusan Kepala Dinas

tentang Pembentukan tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah, dilanjutkan dengan orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah, kemudian penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah, dan terakhir penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka keberadaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah khususnya dalam menjalankan rencana pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah. Renstra Dinas Perhubungan ini juga telah mengacu pada rencana strategis Kementerian Perhubungan RI serta Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan untuk selanjutnya Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah setiap tahunnya dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

Kemudian dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, keberadaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lombok Tengah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam menetapkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah disusun berdasarkan :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- h. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah
- i. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

- j. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 – 2026

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 – 2026 dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur pelaksanaan strategi pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban, yaitu antara lain untuk:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas dibidang perencanaan pembangunan sehingga tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2021 - 2026 dapat tercapai;
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, termasuk pelaksanaan monitoring, analisis, dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan mengenai rencana pembangunan lima tahunan;
4. Menjadi kerangka dasar dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 - 2026 yaitu untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Lombok Tengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 – 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih

- 3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah dibidang perhubungan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah.

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Dinas Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perhubungan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Perhubungan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Perhubungan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Unsur organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana dengan tugas sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang Perhubungan dan

tugas pembantuan serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sekretariat

Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan yang meliputi urusan Perencanaan dan Keuangan serta Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Lalu Lintas

Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka pembinaan teknis penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas. Bidang Lalu Lintas membawahi Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Seksi Pengendalian, Pengawasan dan Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas, serta Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas

d. Bidang Angkutan

Bidang Teknik dan Angkutan Umum dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka pembinaan teknis penyelenggaraan bidang Teknik dan Angkutan Umum serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bidang angkutan membawahi Seksi Pengendalian Angkutan Darat, Seksi Pengendalian dan Kelaikan Kendaraan Bermotor, serta Seksi Kelautan, Kepelabuhan dan Keselamatan Pelayaran

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas

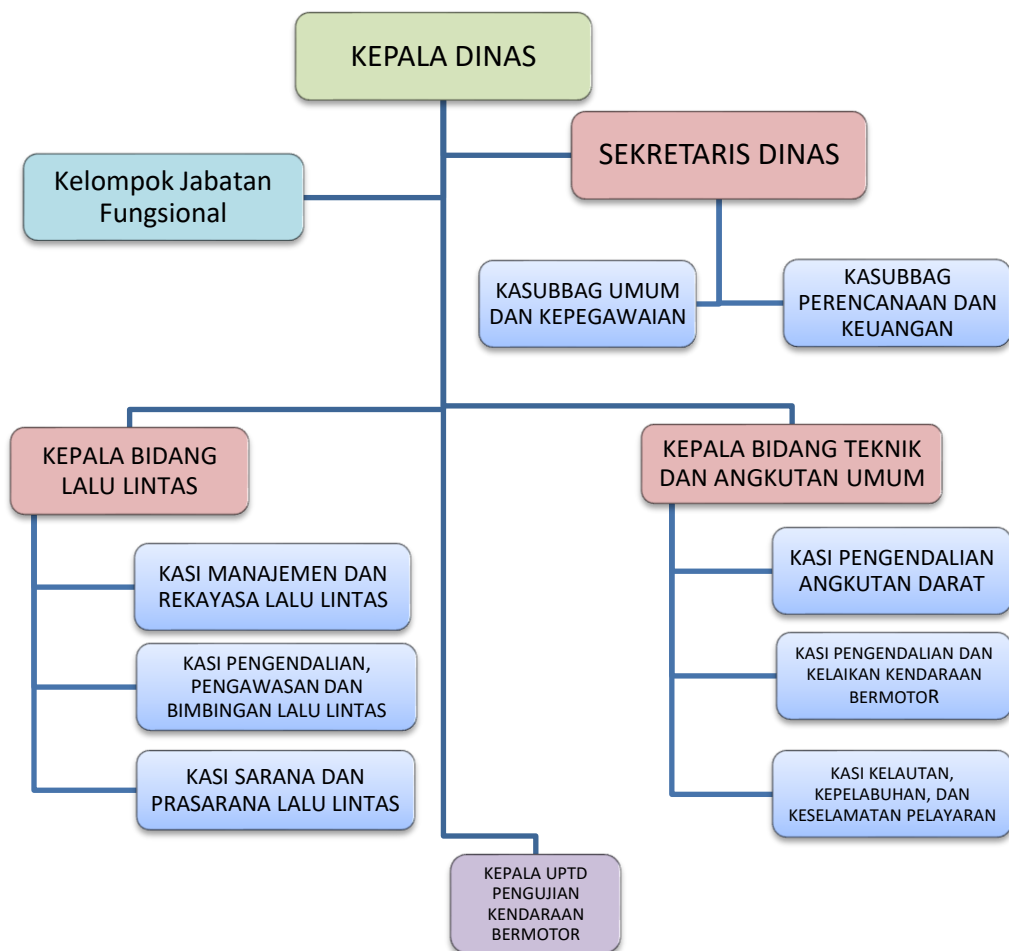
1. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Seluruh kebijakan administrasi pemerintahan dalam implementasinya dikoordinasikan dengan Sekretaris Dinas dan para Kepala Bidang, kemudian penjabaran teknisnya dilaksanakan melalui para Kasubbag, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kepala Tata Usaha UPTD sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Adapun Struktur Organisasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini:



Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Kondisi Pegawai

Berdasarkan kuantitas, sumber daya manusia (SDM) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah menurut golongan ruang/ kepangkatan dan jenis kelamin pada posisi 31 Desember Tahun 2020 terinci sebagaimana Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Data PNS menurut Jenis Kelamin dan Golongan Pangkat Tahun 2020

No.	Kepangkatan	Golongan Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1		1
2	Pembina Tk. I	IV/b		1	1
3	Pembina	IV/a	2		2
4	Penata Tk. I	III/d	8		8
5	Penata	III/c	5	1	6
6	Penata Muda Tk. I	III/b	3	1	4
7	Penata Muda	III/a	4	2	6
8	Pengatur Tk. I	II/d	5		5
9	Pengatur	II/c	5	1	6
10	Pengatur Muda Tk.I	II/b	1		1
11	Pengatur Muda	II/a	2		2
Jumlah			36	6	42

Sumber: Laporan Kepegawaian Dinas Perhubungan Tahun 2020

Sedangkan berdasarkan kualitas dan tanggung jawab kerja, SDM Dinas Perhubungan dibedakan menurut basis tingkat pendidikan dan unit kerjanya yang dirincikan seperti pada Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Data PNS menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020

No.	Unit Kerja/Bidang	S2	S1	D4	D3	SMA/ STM	SMP	SD	Jumlah
1	Sekretariat	3	4		1	4			12
2	Bidang Teknik dan Angkutan Umum		5		1	3			9
3	Bidang Lalu Lintas		6	1	2	6			15
4	UPTD PKB		1			5			6
Jumlah		3	16	1	4	18	-	-	42

Sumber: Laporan Kepegawaian Dinas Perhubungan Tahun 2020

Karena terbatasnya jumlah PNS yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah yang tidak dapat meng-*handle* seluruh kegiatan yang menjadi tupoksi Dinas Perhubungan terutama kegiatan-kegiatan di lapangan, maka kinerja Dinas Perhubungan dibantu oleh Pegawai Non PNS yang jumlahnya per 31 Desember 2020 disajikan pada Tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Non PNS Dinas Perhubungan

No	Uraian	Jumlah
1	Pegawai Tidak Tetap Honor Daerah (SK Bupati)	5
2	Petugas Patroli LLAJ	15
3	Petugas Pengendalian dan Pengawasan Saat Insidentil	10
5	Teknisi Penerangan Jalan Umum	20
4	Petugas Pengawas PJU Kecamatan	12
5	Teknisi Traffic Light	1
6	Petugas Penertiban Parkir dan Terminal	12
7	Petugas Penertiban Ijin Angkutan	4
8	Petugas Pengawas Ijin Angkutan Laut	5
10	Operator Alat Uji dan SIM PKB	7
9	Petugas Survey Fasilitas Keselamatan Jalan	6
10	Tenaga Kebersihan	1
Jumlah		98

Sumber: Laporan Kepegawaian Dinas Perhubungan Tahun 2020

2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pada umumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung dipergunakan untuk menunjang pelayanan perkantoran. Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan antara lain seperti yang disajikan pada Tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4
Jumlah Sarana dan Prasarana pada Dinas Perhubungan

No	Nama Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Kendaraan Dinas Roda 2 (unit)	28
2	Kendaraan Dinas Roda 4 (unit)	13
3	Kendaraan Dinas Roda 6 (unit)	4
4	Kendaraan Hidrolik PJU (unit)	1
5	Speed Boat (unit)	2
6	Traffic Light (unit)	11
7	Warning Light (unit)	3
8	Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan – RPPJ (buah)	37
9	Pagar Pengaman Jalan (meter)	532
10	Rambu Jalan (buah)	2316
11	Patok Tikungan (buah)	560
12	Traffic Cone, Rambu Pengalih Arus, Road Barrier, dll (buah)	222
13	Alat Uji Kendaraan Bermotor (unit)	6
14	Generator Set (unit)	1
15	Lemari (buah)	22
16	Brankas (buah)	1
17	Papan Visual/Papan Nama (unit)	1
18	Mesin Absensi (unit)	1
19	Meja Kerja (buah)	78
20	Kursi Kerja (buah)	143
21	Kursi Tamu/Sofa (set)	4
22	AC Window (unit)	3
23	Kipas Angin (unit)	5

No	Nama Sarana dan Prasarana	Jumlah
24	Sound System (unit)	1
25	Megaphone (unit)	3
26	Camera Video/Digital (unit)	3
27	Handy Talky (unit)	25
28	Senter (buah)	40
29	Komputer (unit)	8
30	Laptop (unit)	10
31	Printer (unit)	10

Sumber : Laporan Aset Dinas Perhubungan Tahun 2020

Sebagian besar umur sarana dan prasarana di atas adalah lebih dari 5 (lima) tahun sehingga dibutuhkan pemeliharaan maupun peremajaan sarana dan prasarana agar tetap dapat mendukung kinerja secara lebih optimal.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah selama 5 tahun periode RKPD berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU), dapat diuraikan pada Tabel 2.5 berikut ini:

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

No	Indikator Kinerja berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Angka Kecelakaan Lalu Lintas	Kasus				166	158	150	130	110	166	210	201	158		100	67,09	66,0	78,46	
1.a	Jumlah Rambu pada Jalan Kabupaten	Buah				2762	3015	3551	4086	4386	3089	3509	3679	3681	3830	111,8	116,4	103,6	90,1	83,9
1.b	Giat Pengendalian Lalu Lintas	Bulan				12	24	36	48	60	12	24	36	48	60	100	100	100	100	100
1.c	Giat Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Bulan				12	24	36	48	60	12	24	36	48	60	100	100	100	100	100
1.d	Jumlah Kendaraan yang Laik Jalan (lulus uji)	Unit				7115	14415	21915	29615	37515	7115	14925	22945	29984		100	103,5	104,7	101,2	
2	Rasio Jumlah Kendaraan terhadap Jumlah Penumpang	Rasio				-	-	-	1:40	1:40	-	-	-	1:10	1:8	-	-	-	25,00	20,00
2.1	Giat Pengendalian dan Pengawasan Ijin Angkutan	Bulan				12	24	36	48	60	12	24	36	48	60	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
2.2	Data Jumlah Rekomendasi Perijinan di Bidang Perhubungan	dokumen				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100
2.3	Peningkatan Jumlah Sarana dan Prasarana Transportasi	Buah				2	4	13	20	26	3	5	14	14	18	150	125	107,7	70	69
2.4	Giat Penertiban Parkir dan Terminal	Bulan				12	24	36	48	60	12	24	36	48	60	100	100	100	100	100
2.5	Survey Rasio Penumpang	Kali				-	-	-	7	-	-	-	-	14	-	-	-	-	200	-
2.6	Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	Kali				2	4	8	16	17	7	12	20	26	26	350	300	250	162,5	152,9

Karena penyusunan Renstra ini dilakukan sebelum berakhirnya tahun anggaran 2021, maka penjelasan/interpretasi dapat kami jelaskan terkait realisasi sampai dengan Tahun 2020 untuk masing-masing indikator dari sasaran pada Tabel 2.5 di atas:

1. Indikator Angka Kecelakaan Lalu Lintas

Capain target pada indikator Angka Kecelakaan Lalu Lintas jika dibandingkan terhadap target Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2016-2021 yaitu sbb:

Tabel 2.6
Capaian Indikator Angka Kecelakaan Lalu Lintas

No	Indikator	Satuan	Persentase Capaian Kinerja
1	Angka Kecelakaan Lalu Lintas	kasus	
a	<i>Tahun 2017</i>		
	Target	166	100,00
	Realisasi	166	
b	<i>Tahun 2018</i>		
	Target	158	67,09
	Realisasi	210	
c	<i>Tahun 2019</i>		
	Target	150	66,00
	Realisasi	201	
d	<i>Tahun 2020</i>		
	Target	130	78,46
	Realisasi	158	
Rata-rata Capaian Kinerja			77,89
Kriteria			SEDANG

Sumber: Polres Lombok Tengah

Belum tercapainya target untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas seperti yang telah ditetapkan pada Renstra terjadi karena beberapa hal antara lain:

- 1) Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Adapun penyebab utama dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) faktor yaitu:

- a. Faktor Manusia; yang faktor utama penyebab kecelakaan, umumnya terjadi karena kesalahan, perilaku, ataupun kemampuan pengemudi;
 - b. Faktor Kendaraan itu Sendiri; hal ini berhubungan dengan kondisi laik jalan dari kendaraan yang digunakan;
 - c. Faktor Jalan; seperti desain geometrik jalan dan layout yang tidak sesuai, kondisi permukaan jalan yang kurang memenuhi syarat, dll;
 - d. Faktor Lingkungan; seperti faktor cuaca dan kondisi alam.,
- 2) Peningkatan jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan peningkatan ruas jalan.

Dari faktor-faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Perhubungan dalam upaya menurunkan angka kecelakaan lalu lintas hanya mendukung sebagian saja dari upaya penurunan angka kecelakaan, karena pada sisi lain semua upaya tersebut tetap tidak akan memiliki hasil tanpa diiringi oleh kesadaran pengguna jalan dalam mematuhi peraturan dalam berlalu lintas.

Berikut ini akan diuraikan beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam upaya menurunkan angka kecelakaan lalu lintas yaitu:

a. Penyediaan Fasilitas Keselamatan Jalan

Capaian kinerja pada indikator Penyediaan Fasilitas Keselamatan Jalan disajikan pada Tabel 2.7. Dari Tabel tersebut terlihat bahwa capaian kinerja pada indikator ini termasuk dalam kriteria "**kurang**". Hal tersebut terjadi karena pada Tahun Anggaran 2020 anggaran kegiatan ini mengalami refocusing dan realokasi untuk penanganan pandemi Covid-19. Oleh karena itu Dinas Perhubungan mengupayakan pengajuan usulan kegiatan ini melalui Dana Alokasi Khusus maupun dana APBN lainnya.

Tabel 2.7

Capaian Indikator Penyediaan Fasilitas Keselamatan Jalan pada Jalan Kabupaten

No	Indikator	Satuan	Realisasi					Target Akhir Renstra	Persentase Capaian sd. Tahun 2020	Ket.
			2017	2018	2019	2020	Jumlah			
1a	Jumlah Rambu pada Jalan Kabupaten:									
a	Rambu Jalan	bh	105	100	70	-	275	475	57,89	
b	Pagar Pengaman Jalan	m	-	60	-	-	60	186	32,26	
c	RPPJ	bh	12	10	-	-	22	27	81,48	
d	Cermin Tikungan	bh	-	4	-	-	4	9	44,44	
e	Traffic Light	unit	2	-	-	-	2	4	50,00	
f	Patok Tikungan	bh	40	100	50	-	190	390	48,72	
g	(Traffic Cone, Rambu Pengalih Arus, Road Barrier, dll)	bh	42	140	40	-	222	397	55,92	
Rata-rata Capaian sampai dengan Tahun 2020									52,96	
Target Capaian Renstra sampai dengan Tahun 2020									80,00	
Persentase Capaian terhadap Target									66,20	
Kriteria Capaian terhadap Target									KURANG	

Sumber: Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas

b. Pengendalian Arus Lalu Lintas

Capaian kinerja pada indikator pengendalian arus lalu lintas terhadap target

Renstra dapat diuraikan pada Tabel 2.8 berikut ini:

Tabel 2.8

Capaian Indikator Jumlah Pengendalian Arus Lalu Lintas

No	Indikator	Satuan	Realisasi					Target Akhir Renstra	Persentase Capaian sd. Tahun 2020	Ket.
			2017	2018	2019	2020	Jumlah			
1b	Jumlah Pengendalian Arus Lalu Lintas:	bulan	12	12	12	12	48	60	80,00	
Target Capaian Renstra sampai dengan Tahun 2020									80,00	
Persentase Capaian terhadap Target									100,00	
Kriteria Capaian terhadap Target									BAIK	

Sumber: Seksi Pengendalian, Pengawasan, dan Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas

Dari Tabel tersebut terlihat bahwa capaian kinerja pada indikator jumlah pengendalian arus lalu lintas sampai dengan tahun 2020 berhasil mencapai kriteria “baik”. Capaian kinerja ini akan terus ditingkatkan kuantitas maupun kualitasnya agar mampu berperan secara signifikan dalam menurunkan angka kecelakaan lalu lintas.

c. Giat Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas ini selain untuk meningkatkan keselamatan juga dimaksudkan untuk menciptakan kondisi lalu lintas pada suatu kawasan agar dapat berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Beberapa hal yang telah dilakukan antara lain melalui kegiatan rawan pagi, rawan pasar, maupun pembentukan Forum Lalu dan Angkutan Jalan (FLLAJ) Kabupaten Lombok Tengah.

Adapun capaian kinerja pada indikator penataan lalu lintas berbasis kawasan ini dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.9

Capaian Indikator Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

No	Indikator	Satuan	Realisasi					Target Akhir Renstra	Persentase Capaian sd. Tahun 2020	Ket.
			2017	2018	2019	2020	Jumlah			
1c	Giat Penataan Lalu Lintas Berbasis Kawasan	bulan	12	12	12	12	48	80	80,00	
Target Capaian Renstra sampai dengan Tahun 2019									80,00	
Persentase Capaian terhadap Target									100,00	
Kriteria Capaian terhadap Target									BAIK	

Sumber: Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

d. Peningkatan Jumlah Kendaraan yang Lulus Uji

Sasaran untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas juga dicapai oleh

Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah melalui upaya peningkatan kualitas pengujian kendaraan bermotor. Capaian kinerja pengujian kendaraan bermotor pada diukur dengan indikator jumlah kendaraan yang diuji setiap tahunnya. Adapun hasil dari capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.10 berikut ini:

Tabel 2.10
Capaian Indikator Jumlah Kendaraan yang Lulus Uji

No	Indikator	Satuan	Realisasi					Target Akhir Renstra	Persentase Capaian sd. Tahun 2020	Ket.
			2017	2018	2019	2020	Jumlah			
1d	Jumlah Kendaraan yang Lulus Uji	unit	7.115	7.810	8.020	7.039	29.984	37.515	79,93	
Target Capaian Renstra sampai dengan Tahun 2020									80,00	
Persentase Capaian terhadap Target									99,91	
Kriteria Capaian terhadap Target									BAIK	

Sumber: UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

Dari Tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja pada indikator jumlah kendaraan yang lulus uji mencapai hasil 99,91% atau tergolong **"baik"**.

2. Indikator Rasio Jumlah Kendaraan terhadap Jumlah Penumpang

Untuk mengukur rasio Jumlah Kendaraan terhadap Jumlah Penumpang, Dinas Perhubungan melalui Bidang Teknik dan Angkutan Umum telah melaksanakan Survey Statis Dinamis Angkutan Umum khusus pada angkutan umum perdesaan untuk mengetahui Load Factor (Faktor Muat) penumpang, dimana faktor muat merupakan perbandingan antara jumlah penumpang yang berada didalam kendaraan dengan kapasitas kendaraan tersebut dan diukur dalam bentuk persentase. Hasil survey tersebut diuraikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.11
Load Factor (LF) Statis di Kabupaten Lombok Tengah

No	Jenis Angkutan	No. Trayek	LF Rata-rata (%)
1	Perdesaan	A2	18
2		B	14
3		E2	26
4		E3	13
5		F1	12
6		F2	13
7		H	17
Rata-rata			16,14

Tabel 2.12
Load Factor (LF) Dinamis di Kabupaten Lombok Tengah

No	Jenis Angkutan	No. Trayek	Pagi	Siang	LF Rata-rata (%)
1	Perdesaan	A2	21	19	18
2		B	12	16	14
3		E2	27	28	26
4		E3	12	11	13
5		F1	12	12	12
6		F2	11	13	13
7		H	18	22	20
Rata-rata			16,14	17,29	16,57

Dari Tabel Load Factor (LF) Statis dan Dinamis di atas terlihat bahwa rata-rata LF di Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2020 adalah sebesar 16,57% (rendah). Permasalahan utama dari rendahnya faktor muat ini adalah kurangnya minat penumpang untuk menggunakan angkutan umum, dimana salah satu faktornya adalah karena kondisi armada angkutan umum yang masih kurang layak baik dari segi kebersihan, kenyamanan serta fasilitas angkutan umum yang kurang nyaman selama dalam perjalanan, sehingga masyarakat lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi atau jenis angkutan lainnya (ojek, taksi, grab, dsb). Terhadap permasalahan ini salah satu solusinya adalah pemberian bantuan/subsidi oleh pemerintah terhadap perbaikan angkutan umum yang ada serta perlunya

pembentukan badan usaha angkutan umum yang dimaksudkan untuk memudahkan kontrol di lapangan.

Faktor lain yang juga memberikan andil terhadap rendahnya jumlah penumpang ini adalah belum tersedianya angkutan perdesaan yang efektif dan efisien yang melayani seluruh wilayah di Kabupaten Lombok Tengah. Dan terkait permasalahan ini Dinas Perhubungan telah melakukan pembukaan trayek perintis Kute–Selong Belanak (PP) dan Kute–Awang (PP) serta telah dirintis trayek khusus untuk pelajar yaitu jurusan Praya–Kopang, Praya–Jonggat, dan Praya–Mujur.

Kemudian untuk melayani kebutuhan masyarakat di daerah perkotaan, pada akhir tahun 2020 Dinas Perhubungan telah melakukan kajian untuk membuat trayek angkutan perkotaan dengan rencana trayek yaitu: Puyung – Renteng – Rebitah – Rumah Sakit - Jontlak – Biao – Tampar Ampar – Dalam Kota Praya – Leneng – Puyung (PP).

Beberapa kegiatan lain yang juga telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum antara lain:

a. Pelaksanaan Pengendalian dan Penertiban Ijin Angkutan

Pelaksanaan kegiatan yang berkoordinasi dengan pihak kepolisian ini bertujuan untuk menertibkan administrasi ijin angkutan umum, seperti ijin trayek dan kartu pengawasan, baik untuk kendaraan dalam trayek maupun tidak dalam trayek. Kegiatan ini dilakukan pada seluruh lintasan trayek se Kabupaten Lombok Tengah.

Capaian kinerja pada indikator ini disajikan pada Tabel 2.13. Dari Tabel tersebut terlihat bahwa capaian kinerja pada indikator pengendalian dan penertiban ijin angkutan telah mencapai 100% pada tahun keempat Renstra, atau

dengan kata lain pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai dengan target yang direncanakan.

Tabel 2.13

Capaian Indikator Pengendalian dan Penertiban Ijin Angkutan

No	Indikator	Satuan	Realisasi					Target Akhir Renstra	Persentase Capaian sd. Tahun 2019	Ket.
			2017	2018	2019	2020	Jumlah			
2a	Pengendalian dan Penertiban Ijin Angkutan	kali	60	60	96	96	312	408	76,47	
Target Capaian Renstra sampai dengan Tahun 2020									76,47	
Persentase Capaian terhadap Target									100,00	
Kriteria Capaian terhadap Target									BAIK	

Sumber: Seksi Pengendalian Angkutan Darat

b. Rekomendasi Perijinan di Bidang Perhubungan

Rekomendasi perijinan yang masih dilayani oleh Dinas Perhubungan adalah rekomendasi perubahan plat nomor dan rekomendasi ijin trayek. Penerbitan rekomendasi ini dimaksudkan untuk menertibkan angkutan umum, karena masih ditemukannya kendaraan plat hitam yang dioperasikan untuk mengangkut penumpang.

Capaian kinerja pada indikator ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.14

Capaian Indikator Rekomendasi Perijinan di Bidang Perhubungan

No	Indikator	Satuan	Realisasi					Target Akhir Renstra	Persentase Capaian sd. Tahun 2020	Ket.
			2017	2018	2019	2020	Jumlah			
2b	Rekomendasi Perijinan di Bidang Perhubungan	dok	2	2	2	2	8	10	80,00	
Target Capaian Renstra sampai dengan Tahun 2020									80,00	
Persentase Capaian terhadap Target									100,00	
Kriteria Capaian terhadap Target									BAIK	

Sumber: Seksi Pengendalian Angkutan Darat

Tabel di atas menjelaskan bahwa pelaksanaan penerbitan rekomendasi di Bidang Perhubungan telah berjalan sesuai dengan target yang direncanakan.

c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi

Capaian kinerja pada indikator tersebut terhadap target Renstra dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.15
Capaian Indikator Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi

No	Indikator	Satuan	Realisasi					Target Akhir Renstra	Persentase Capaian sd. Tahun 2020	Ket.
			2017	2018	2019	2020	Jumlah			
2c	Sarana dan Prasarana Transportasi:									
	a. Bus	unit	-	-	5	-	5	12	41,67	
	b. Speedboat	unit	-	2	2	-	4	8	50,00	
	c. Dermaga Tambatan Perahu	buah	2	-	2	-	4	7	57,14	
Rata-rata Capaian sd. Tahun 2020									49,60	
Target Capaian Renstra sampai dengan Tahun 2020									80,00	
Persentase Capaian terhadap Target									62,00	
Kriteria Capaian terhadap Target									KURANG	

Sumber: Bidang Teknik dan Angkutan Umum

Dari Tabel tersebut terlihat bahwa capaian kinerja pada Indikator Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi pada tahun ke-empat Renstra adalah sebesar 62% dan masih berada pada kriteria "**kurang**". Penyebab dari hal ini adalah karena seluruh anggaran pada indikator ini bersumber dari dana DAK sehingga sangat tergantung pada porsi DAK yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.

d. Terlaksananya Penertiban Parkir dan Terminal

Capaian indikator Frekuensi Penertiban Parkir dan Terminal sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.16 berikut ini:

Tabel 2.16
Capaian Indikator Penertiban Parkir dan Terminal

No	Indikator	Satuan	Realisasi					Target Akhir Renstra	Persentase Capaian sd. Tahun 2020	Ket.
			2017	2018	2019	2020	Jumlah			
2d	Frekuensi Penertiban Parkir dan Terminal	kali	96	96	96	144	432	576	80,00	
Target Capaian Renstra sampai dengan Tahun 2020									80,00	
Persentase Capaian terhadap Target									100,00	
Kriteria Capaian terhadap Target									BAIK	

Sumber: Seksi Pengendalian Kelaikan Kendaraan Bermotor

Dari Tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja Dinas Perhubungan pada indikator Frekuensi Penertiban Parkir dan Terminal berhasil mencapai kriteria “baik”. Penertiban parkir dan terminal ini dimaksudkan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas dan mendukung penataan kota melalui peningkatan kedisiplinan pengguna jalan dan angkutan umum dalam mematuhi peraturan berlalu lintas.

e. Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan

Upaya lain untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan berupa penurunan angka kecelakaan adalah melalui kegiatan sosialisasi-sosialisasi.

Capaian kinerja pada indikator jumlah sosialisasi ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.17
Capaian Indikator Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan

No	Indikator	Satuan	Realisasi					Target Akhir Renstra	Persentase Capaian sd. Tahun 2020	Ket.
			2017	2018	2019	2020	Jumlah			
2e	Jumlah Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	kali	7	5	8	6	26	17	152,94	
Target Capaian Renstra sampai dengan Tahun 2020									80,00	
Persentase Capaian terhadap Target									191,18	
Kriteria Capaian terhadap Target									SANGAT BAIK	

Dari Tabel di atas terlihat bahwa capaian indikator Jumlah Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan telah melampaui target yang telah ditetapkan pada Renstra, yaitu sebanyak 26 kali dari target sebanyak 17 kali jumlah sosialisasi sampai akhir tahun 2021. Pelampauan capaian target ini menunjukkan kinerja Dinas Perhubungan pada indikator ini termasuk dalam kriteria "**sangat baik**".

Seluruh upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan seperti yang telah diuraikan di atas yaitu mulai dari penyediaan fasilitas keselamatan jalan, pengendalian arus lalu lintas, penataan lalu lintas berbasis kawasan, pengujian kendaraan bermotor, penertiban parkir dan terminal, penertiban angkutan umum, serta sosialisasi kebijakan di bidang Perhubungan bermuara pada satu tujuan, yaitu untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas.

Tabel 2.18
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

Tabel 2.18.a

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- (Rp)				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Pendapatan	635.370.000	976.940.000	1.020.260.000	403.764.000	978.620.000	443.094.300	816.130.344	569.458.663	525.443.823	
Belanja Tidak Langsung	3.862.381.136	3.527.756.839	3.712.914.752	3.433.386.366	3.969.811.901	3.558.435.841	3.447.794.276	3.323.794.198	3.137.664.201	
Belanja Langsung	11.833.232.643	11.835.345.000	8.021.702.000	1.714.736.100	18.024.468.947	10.767.374.366	9.237.240.841	7.428.322.550	1.695.917.599	

Tabel 2.18.b

Uraian	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Pendapatan	69,74	83,54	55,82	130,14		9,02	4,35
Belanja Tidak Langsung	92,13	97,73	89,52	91,39		0,55	(3,10)
Belanja Langsung	90,99	78,05	92,60	98,90		8,78	(37,00)

Dari Tabel 2.18 di atas terlihat bahwa:

- rata-rata pertumbuhan anggaran Pendapatan mengalami kenaikan sebesar 9,02% per tahun dan kenaikan realisasi rata-rata sebesar 4,35% per tahun;
- pada Belanja Tidak Langsung, rata-rata pertumbuhan anggaran mengalami kenaikan sebesar 0,55% pertahun dan mengalami penurunan realisasi rata-rata sebesar 3,10% per tahun. Hal ini terjadi karena adanya pengurangan jumlah pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah akibat adanya pegawai yang pensiun ataupun pindah;
- sedangkan pada Belanja Langsung rata-rata pertumbuhan anggaran mengalami kenaikan sebesar 8,78% per tahun, namun realisasi mengalami penurunan rata-rata sebesar 37% per tahun. Terkait dengan penurunan tersebut, rasio antara realisasi dan anggaran terendah terjadi pada tahun ke-2 (tahun 2018) yaitu sebesar 78,05%, dimana pada tahun ini terdapat sisa lelang/tender pada pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan (DAK) senilai Rp 2.417.462.000,00

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan Kabupaten Lombok Tengah akan mengalami transformasi dalam berbagai bidang, salah satunya yakni di bidang pariwisata. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang menjadi salah satu kawasan super prioritas yang merupakan program “10 Bali Baru” yang dicanangkan oleh pemerintah pusat diharapkan akan dapat memberikan dampak positif dalam berbagai bidang. Pembangunan sirkuit berstandar internasional pada Kawasan

Ekonomi Khusus Mandalika juga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah pada khususnya.

Gelaran berbagai event internasional pada kawasan tersebut membutuhkan akomodasi baik dari pembangunan infrastruktur maupun penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai agar dapat memberikan fasilitas yang maksimal untuk para wisatawan. Kebutuhan akan sarana transportasi tersebut diperlukan sebagai sarana untuk peningkatan konektivitas antar wilayah yang menjadi salah satu tujuan pada RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026.

Untuk memberikan jaminan keselamatan, kelancaran dan kenyamanan masyarakat dalam berlalu lintas maka perlu dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam upaya meningkatkan layanan di bidang perhubungan, antara lain:

- a. Penyusunan perencanaan transportasi melalui penyusunan Rencana Induk Transportasi serta penyusunan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
- b. Pembangunan ATCS (Area Traffic Control System)
- c. Pengendalian ruas jalan dengan menempatkan petugas lapangan terutama pada jam-jam sibuk
- d. Pelaksanaan studi angkutan umum

Kemudian beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan urusan perhubungan selama lima tahun ke depan antara lain:

1. Belum tercapainya beberapa target pada Renstra sebelumnya, yaitu pada indikator:
 - a. Penurunan angka kecelakaan lalu lintas;
 - b. Ketersediaan fasilitas keselamatan jalan pada jalan kabupaten;

- c. Ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten;
 - d. Rendahnya load factor (faktor muat) penumpang
2. Pertumbuhan kendaraan pribadi yang meningkat cukup pesat setiap tahunnya
 3. Berkembangnya ojek online disaat pelayanan angkutan umum kurang optimal serta adanya pergeseran pemilihan moda angkutan dari angkutan massal (bus) beralih kepada kendaraan yang lebih kecil (travel) khususnya pada pelayanan angkutan jarak jauh.

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan urusan perhubungan antara lain:

1. Posisi strategis Kabupaten Lombok Tengah dengan ditetapkannya Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Super Prioritas, dibangunnya sirkuit bertaraf internasional di Kawasan KEK Mandalika, serta letak Bandar Udara Internasional Lombok yang berada pada wilayah Kabupaten Lombok Tengah;
2. Kegiatan pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah dapat mendorong perkembangan angkutan;
3. Merupakan salah satu daerah yang ditetapkan menjadi kabupaten Smart City di Indonesia.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu Kabupaten di Indonesia yang ikut terdaftar sebagai Kabupaten Smart City (Kota Cerdas). Salah satu kriteria suatu daerah dikatakan sebagai kota cerdas adalah tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai bagi warganya. Fungsi dan peran serta masalah yang ditimbulkan oleh sarana transportasi ini semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi dan pertumbuhan penduduk.

Transportasi merupakan unsur yang menentukan laju pertumbuhan ekonomi dan sosial suatu wilayah serta mampu mempengaruhi mobilitas informasi dan penduduk antar wilayah. Hal ini disebabkan oleh peran transportasi yang menjalankan dua fungsi, yaitu sebagai penggerak pembangunan dan untuk melayani kegiatan-kegiatan nyata, terutama kegiatan perekonomian.

Sebagai salah satu tujuan wisata yang menjadi perhatian dunia, Kabupaten Lombok Tengah mengemban berbagai fungsi yaitu sebagai pusat dari berbagai kegiatan seperti pusat pemerintahan, pariwisata, maupun perdagangan. Hal ini tentu saja berpengaruh pada layanan sistem transportasi yang ada di Kabupaten Lombok Tengah.

Tabel 3.1 (Tabel T-B.35)

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan dan Prioritas Sasaran Pembangunan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Keselamatan Lalu Lintas	Kecelakaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi topografi jalan - Banyak resiko berbahaya pada daerah rawan kecelakaan - Pelanggaran terhadap aturan berlalu lintas - Kurangnya kesadaran para pengguna jalan - Kurangnya perlengkapan jalan
		Kesadaran Pengguna Jalan	<ul style="list-style-type: none"> - Keselamatan berlalu lintas masih dianggap belum penting dan menjadi pokok permasalahan yang mendesak - Kurangnya himbauan keselamatan berlalu lintas melalui media cetak maupun media elektronik - Kurangnya Pendidikan keselamatan berlalu lintas
		Kemacetan pada lokasi dan jam tertentu (seperti pada pasar tumpah dan pada jam sibuk)	<ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas jalan kurang memadai - Kurangnya jalan alternatif
2	Adanya angkutan umum yang tidak beroperasi serta kelangsungan hidup angkutan umum yang diambang kebangkrutan	Rendahnya load factor	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan angkutan umum yang masih dibawah standar - Semakin banyaknya jumlah angkutan pribadi di jalan raya, baik roda 2 maupun roda 4 - Semakin berkembangnya angkutan tidak dalam trayek (online)
3	Regulasi tata kelola perparkiran	Penetapan lahan parkir serta aturan bagi hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Masih maraknya praktik parkir liar di beberapa ruas jalan yang bukan peruntukannya - Belum adanya regulasi terkait sistem pembagian pendapatan antara juru parkir dengan Pemda

Selain itu telah diidentifikasi permasalahan pada lingkungan eksternal sebagai berikut:

Tabel 3.2
Identifikasi Isu-Isu Strategis Lingkungan Eksternal

Isu-Isu Strategis			
No.	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional
1	Aksi keselamatan jalan darat internasional	<ul style="list-style-type: none"> - Kampanye keselamatan transportasi untuk semua - Program <i>Road Map to Zero Accident</i> 	Koordinasi stakeholder pilar keselamatan berlalu lintas
2	Globalisasi dalam bidang perekonomian	Pembangunan nasional	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika - Pembangunan Pertamina Mandalika International Street Circuit
3	Pemanfaatan teknologi dalam berbagai bidang	Munculnya angkutan tidak dalam trayek (online)	Rentan terjadinya konflik angkutan umum konvensional dengan angkutan yang berbasis online

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 adalah: "**Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA)**".

Misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah:

1. Merawat Ahlaqul Karimah dalam Kehidupan Bermasyarakat

2. Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri dan Unggul;
3. Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih;
4. Pembangunan Ekonomi yang Berkeimbangan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas;
5. Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya Luhur.

Dikaitkan dengan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam RPJMD 2021-2026 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, maka fungsi dan tugas Dinas Perhubungan terkait erat dengan pencapaian Misi 4 yaitu: **Pembangunan Ekonomi yang Berkeimbangan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas.**

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi karena secara langsung peningkatan infrastruktur yang menghubungkan antara pusat pertumbuhan ekonomi mampu mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa, sehingga dapat mengurangi biaya produksi. Dengan demikian ketersediaan infrastruktur akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah terhadap pencapaian Visi, Misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD terhadap Pencapaian
Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

NO	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Visi	Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA)		
	Misi 4	Pembangunan Ekonomi yang Berkeseimbangan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas		
1	Pembangunan Ekonomi yang Berkeseimbangan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas			
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Tingginya angka kecelakaan lalu lintas	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi topografi jalan - Banyak resiko berbahaya pada daerah rawan kecelakaan - Kurangnya fasilitas keselamatan jalan - Kurangnya kesadaran dan kepatuhan pengguna jalan 	Komitmen bersama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk menyukseskan kampanye "keselamatan untuk semua"
		Kemacetan pada lokasi dan jam tertentu	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kapasitas jalan - Kurangnya jalan alternatif 	Peningkatan pembangunan jalan merupakan salah satu target RPJMD
		Rendahnya load factor (faktor muat) penumpang	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan angkutan umum masih dibawah standar - Meningkatnya jumlah kendaraan pribadi - Berkembangnya angkutan tidak dalam trayek (online) 	Kebutuhan masyarakat akan transportasi

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan

Berdasarkan Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 maka Visi dan Misi Kementerian Perhubungan adalah **“Terwujudnya konektivitas nasional yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah”** dengan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatnya integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
2. Meningkatnya kinerja pelayanan jasa transportasi dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung SDM yang professional serta antisipatif terhadap potensi bencana;
3. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi didukung oleh kualitas dan kompetensi SDM operator dan pelaksana industri transportasi yang berdaya saing internasional, mandiri, dan produktif;
4. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya aparatur dan penegakan hukum secara konsisten;
5. Mewujudkan pengembangan inovasi dan teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Adapun Tujuan dari Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya konektivitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi;
2. Meningkatnya kinerja layanan transportasi;
3. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi;
4. Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan;
5. Terwujudnya penggunaan teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi.

Sedangkan Sasaran Strategis dari Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Terwujudnya konektivitas nasional;
2. Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan;
3. Meningkatnya keselamatan transportasi;
4. Meningkatnya kualitas SDM transportasi yang kompeten;
5. Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, regulasi, dan hukum;
6. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian;
7. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari uraian misi, tujuan, dan sasaran Kementerian Perhubungan tahun 2020-2024 di atas terdapat point yang selaras dengan apa yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah yaitu pada point meningkatnya

konektivitas, meningkatnya kinerja layanan perhubungan, serta meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah
berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perhubungan

NO	Sasaran Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya konektivitas	Rendahnya load factor (faktor muat) penumpang	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan angkutan umum masih dibawah standar - Meningkatnya jumlah kendaraan pribadi - Berkembangnya angkutan tidak dalam trayek (online) 	Kebutuhan masyarakat akan transportasi
2	Meningkatnya kinerja layanan perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya sarana dan prasarana perhubungan - Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi teknis 	Terbatasnya anggaran	Kebutuhan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat
3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi	Tingginya angka kecelakaan lalu lintas	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi topografi jalan - Kerusakan jalan akibat pelanggaran tonase - Kurangnya fasilitas keselamatan jalan - Kurangnya kesadaran dan kepatuhan pengguna jalan 	Kerja sama yang baik antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dalam upaya bersama untuk meningkatkan keselamatan transportasi
		Kemacetan (pada lokasi dan jam tertentu)	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kapasitas jalan - Kurangnya jalan alternatif 	

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 yaitu **“Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang”**. Visi tersebut diwujudkan melalui 6 (enam) Misi pembangunan.

Dinas Perhubungan Provinsi NTB turut serta dalam mendukung Misi Pertama yaitu **NTB Tangguh dan Mantap melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah.**

Sasaran Dinas Perhubungan Provinsi NTB yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya konektivitas layanan transportasi
2. Meningkatnya keselamatan transportasi darat

Sedangkan Strategi yang dirumuskan untuk mencapai tujuan Dinas Perhubungan Provinsi NTB yaitu **“Terwujudnya Konektivitas antar Wilayah dan Keselamatan Lalu Lintas Transportasi Publik”** adalah:

1. Menyelenggarakan layanan jaringan dan distribusi transportasi melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi yang memadai untuk mendukung pariwisata dan event internasional MotoGP;
2. Menyediakan jasa pelayanan sektor transportasi yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
3. Mengembangkan sistem transportasi berkelanjutan yang mengutamakan integrasi antarmoda dan intermodal untuk angkutan umum, jalan kaki, dan sepeda;
4. Menyiapkan regulasi daerah di sektor transportasi yang mendukung pembangunan ekonomi, pengembangan wilayah strategis, dan

mengantisipasi isu strategis terkait Covid-19, gender dan disabilitas, kebencanaan, perubahan iklim, dan SDGs.

5. Meningkatkan keselamatan lalu lintas melalui upaya meningkatkan manajemen keselamatan jalan, meningkatkan jalan berkeselamatan, meningkatkan sarana transportasi yang berkeselamatan, sosialisasi keselamatan bagi pengguna jalan, dan meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait penanganan kecelakaan.

Tabel 3.5

Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya Konektivitas Layanan Transportasi	Rendahnya load factor (faktor muat) penumpang	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan angkutan umum masih dibawah standar - Meningkatnya jumlah kendaraan pribadi - Berkembangnya angkutan tidak dalam trayek (online) 	Kebutuhan masyarakat akan transportasi
2	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	Tingginya angka kecelakaan lalu lintas	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi topografi jalan - Banyaknya resiko berbahaya pada daerah rawan kecelakaan - Kurangnya fasilitas keselamatan jalan - Kurangnya kesadaran dan kepatuhan pengguna jalan 	Kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dalam upaya bersama untuk meningkatkan keselamatan transportasi

No	Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Kemacetan (pada lokasi dan jam tertentu)	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kapasitas jalan - Kurangnya jalan alternatif 	

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Tujuan pengembangan tata ruang wilayah Kabupaten Lombok Tengah adalah untuk mewujudkan Kabupaten Lombok Tengah sebagai pusat dan pintu masuk pariwisata di Pulau Lombok yang didukung oleh budaya lokal, pertanian dan perikanan dengan tetap memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Tabel 3.6
Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Pengembangan Kawasan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya perlengkapan jalan yang menuju lokasi wisata - Terdapat daerah rawan kecelakaan 	Terbatasnya anggaran	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika - Pembangunan Pertamina Mandalika International Street Circuit

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
2	Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi	Rendahnya load factor (faktor muat) penumpang	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan angkutan umum masih dibawah standar - Meningkatnya jumlah kendaraan pribadi - Berkembangnya angkutan tidak dalam trayek (online) 	Kebutuhan masyarakat akan transportasi

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan dokumen yang disusun untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Kaitannya dengan penyusunan Rencana Strategis yaitu memberikan penilaian kelayakan program strategis pembangunan dalam kerangka prinsip keberlanjutan. KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program dapat “lebih hijau” dalam arti dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Tabel 3.7
Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Kabupaten Lombok Tengah

Isu Strategis Pengembangan Kawasan	Perumusan Program Pembangunan yang Berdampak Negatif terhadap Isu Strategis	Rumusan Mitigasi/Adaptasi atau Alternatif		Renstra SKPD (Ya/Tidak)	Rekomendasi
		Mitigasi/Adaptasi	Alternatif		
<ul style="list-style-type: none"> - Posisi KSP Kuta dsk pada wilayah pesisir dan jalur “cincin api” berakibat pada kerawanan terhadap bencana alam - Adanya potensi migrasi tenaga kerja pendukung pada wilayah KSP Kuta dsk akibat pengembangan KEK Mandalika - Akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar dan sarana pelayanan umum yang masih rendah - Potensi energi baru terbarukan (EBT) yang belum dimanfaatkan secara optimal - Adanya rencana TPST Lemer sebagai infrastuktur pengelolaan timbulah sampah yang semakin meningkat - Sistem transportasi wilayah yang belum terkoneksi antar pusat-pusat kegiatan baru di KSP Kuta dsk - Degradasi lingkungan berupa alih fungsi lahan yang tinggi sekitar kawasan hutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan penyediaan infrastruktur dasar pada semua bidang - Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima di segala bidang dan berorientasi pada kepuasan masyarakat - Mengembangkan pariwisata daerah yang berbasis pada seni dan budaya lokal serta potensi sumber daya alam 	<ul style="list-style-type: none"> - Menghubungkan pusat dan sub pusat yang memiliki akses yang baik dan tersedianya angkutan umum yang memadai - Regulasi untuk mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi menjadi kendaraan umum - Memperlebar ruang milik jalan pada jalan-jalan yang sudah tidak dapat menampung kendaraan dan merencanakan rekayasa lalu lintas perbaikan dan perawatan sarana dan prasarana transportasi publik - Pengintegrasian dan pembentukan linkage system antar wilayah pusat kegiatan dengan lokasi terminal atau sarana transportasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Sinkronisasi antara pengembangan kawasan dan pengembangan infrastruktur jalan dengan sarana transportasi publik - Mengatur kembali pusat-pusat kegiatan untuk meratakan kegiatan di seluruh wilayah kabupaten serta mengimbangi pemusatan perkembangan pariwisata daerah 	Ya	<ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan perlengkapan jalan - Penyusunan perencanaan transportasi dan andalalin - Pengaturan manajemen lalu lintas dan jalur kendaraan umum dengan jangkauan akses yang terintegrasi dengan pusat kegiatan - Penormalisasian trayek angkutan umum

Isu Strategis Pengembangan Kawasan	Perumusan Program Pembangunan yang Berdampak Negatif terhadap Isu Strategis	Rumusan Mitigasi/Adaptasi atau Alternatif		Renstra SKPD (Ya/Tidak)	Rekomendasi
		Mitigasi/Adaptasi	Alternatif		
<p>Gunung Prabu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingginya potensi ekonomi sektor pariwisata yang belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat - Sistem hulu hilir pengelolaan sektor perikanan yang belum dikelola secara maksimal 					

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa mendatang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional, maupun regional. Isu strategis juga menentukan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lombok Tengah "BERSATU JAYA".

Isu-isu strategis yang akan dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu:

1. Belum optimalnya keselamatan, ketertiban, dan kelancaran transportasi, yang meliputi:
 - a. Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas, terutama pada daerah rawan kecelakaan
 - b. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kedisiplinan dan ketertiban lalu lintas

- c. Kurangnya fasilitas keselamatan jalan
 - d. Penyediaan lahan parkir yang memadai di beberapa titik rawan kemacetan serta penanganan dan penertiban parkir liar
 - e. Masih kurangnya sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor
 - f. Kurangnya kompetensi teknis serta sarana dan prasarana aparatur yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dalam mendukung kelancaran pelayanan di bidang perhubungan
2. Belum optimalnya kualitas layanan angkutan, yang meliputi:
- a. Meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi serta menurunnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum
 - b. Fasilitas pendukung transportasi (terminal, shelter) yang memerlukan penanganan lebih lanjut agar dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi
 - c. Semakin berkembangnya angkutan tidak dalam trayek (online) disaat menurunnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

5.1 TUJUAN DAN SASARAN TINGKAT MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Adapun tujuan daerah yang akan dicapai lima tahun ke depan adalah **Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas**. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam lima tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1 (Tabel T-C.25)

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Transisi 2021	Target Tujuan/Sasaran Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas		Jumlah Daerah Rawan Kecelakaan	n/a	100	98	96	94	92
	Meningkatnya Kelancaran dan Ketertiban Lalu Lintas	V/C Rasio (Tingkat Kejenuhan Lintas)	0,35	0,34	0,33	0,32	0,31	0,30

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas horison waktunya dengan serangkaian arah kebijakan.

Untuk melakukan analisis strategi, Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan analisis SWOT, yaitu dengan mengidentifikasi berbagai faktor sistematis guna merumuskan strateginya yang didasarkan pada logika yang memaksimalkan kekuatan (*strenght*), dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*).

Tabel 5.1

Analisis SWOT

<p style="text-align: center;">INTERNAL</p> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 10px 0;"/> <p style="text-align: center;">EKSTERNAL</p>	<p>KEKUATAN/STRENGTH (S):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eksistensi Kelembagaan 2. Adanya komitmen pimpinan terhadap peningkatan pelayanan perhubungan 3. SDM yang dimiliki berjumlah 140 orang 4. Koordinasi dengan instansi terkait berjalan dengan baik 5. Sarana dan prasarana operasional pelayanan yang dimiliki 	<p>KELEMAHAN/WEAKNESS (W):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi teknis 2. Kurangnya prasarana operasional kerja yang memadai 3. Belum adanya Rencana Induk Transportasi Kabupaten 4. Kurangnya perlengkapan jalan sebagai pendukung untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran, keselamatan, dan kenyamanan lalu lintas
<p>PELUANG/OPPORTUNITY (O):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi 2. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika yang menjadi salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) super prioritas 3. Posisi geostrategis Kabupaten Lombok Tengah serta sebagai salah satu tujuan pariwisata 4. Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu kabupaten yang menuju Smart City 5. Adanya peluang investasi karena potensi sumber daya alam yang melimpah 	<p>STRATEGI S-O:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas aparatur Perhubungan 2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kerja 	<p>STRATEGI W-O:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kinerja perlengkapan jalan 2. Meningkatkan manajemen dan rekayasa lalu lintas 3. Meningkatkan pelayanan angkutan
<p>ANCAMAN/THREATS (T):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kedisiplinan dan ketertiban lalu lintas 2. Persentase pertumbuhan kendaraan tidak sebanding dengan prasarana yang ada 	<p>STRATEGI S-T:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian lalu lintas 2. Meningkatkan kualitas tata kelola kebijakan, regulasi, dan hukum 	<p>STRATEGI W-T:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan keselamatan lalu lintas 2. Meningkatkan kinerja pelayanan Perhubungan

5.2 ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan merupakan ketentuan–ketentuan yang bersifat sangat strategis yang diambil dan ditetapkan untuk dijadikan pedoman dan petunjuk untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah. Kebijakan ditetapkan untuk lebih mendorong dan memfokuskan pada usaha pencapaian tujuan.

Tabel 5.2 (Tabel T-C.26)
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi	Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang Beriman, Sejahtera, Bermutu, Maju, dan Berbudaya (BERSATU JAYA)		
Misi 4	Pembangunan Ekonomi yang Berkeimbangan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas	Meningkatnya Kelancaran dan Ketertiban Lalu Lintas	Meningkatkan Kinerja Perengkapan Jalan	Penyediaan Perlengkapan Jalan Pemeliharaan Perlengkapan jalan
		Meningkatkan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Peningkatan Koordinasi Stakeholder Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
			Peningkatan Perencanaan Transportasi
			Peningkatan Sosialisasi Keselamatan Ber Lalu Lintas
		Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas	Peningkatan Kegiatan Patroli LLAJ
			Peningkatan Pengawasan dan Penertiban Parkir
		Meningkatkan Pelayanan Angkutan	Peningkatan Kinerja Layanan Angkutan
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Terminal
			Peningkatan Keselamatan Angkutan Laut
		Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor
Peningkatan Perencanaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perhubungan			

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dalam kurun waktu lima tahun mulai tahun pertama (2021) sampai dengan tahun kelima (2026) maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan adalah sebagaimana diuraikan dalam Tabel 6.1 berikut ini:

Tabel 6.1 (Tabel T-C.27)
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan
Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	Satuan	Target Kinerja Program, dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target				Rp. (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas		Jumlah Daerah Rawan Kecelakaan	n/a	titik	n/a	100		98		96		94		92		92	Dishub	Kab. Lombok Tengah	
	Sasaran: Meningkatnya Kelancaran dan Ketertiban Lalu Lintas	V/C Rasio	0,165	point	0,35	17.820.204	0,34	15.015.212	0,33	16.557.155	0,32	17.866.940	0,31	19.613.483	0,30	21.534.680	0,30	Dishub	Kab. Lombok Tengah
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Sarpras Keselamatan Jalan	41,87	%	43,91	17.733.205	48,00	14.844.432	55,96	16.286.375	64,20	17.679.082	72,44	19.406.839	79,90	21.307.372	79,90	Dishub	Kab. Lombok Tengah
	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan yang Terpasang	6,10	%	6,18	13.607.515	6,88	13.116.232	8,34	14.427.855	9,76	15.870.641	11,17	17.457.705	12,59	19.203.475	12,59	Dishub	Kab. Lombok Tengah
	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terpasang:	9150	unit	9.268	13.496.715	10.326	12.935.432											
		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	9150	unit				12.510	14.237.055	14.635	15.669.841	16.760	17.246.905	18.886	18.982.675	18.886			
		Traffic Light	11	unit	11			12		12		12		12		12			
		Warning Light	1	unit	7			9		11		14		17		21			
		RPPJ (Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan)	109	buah	109			109		114		119		124		129			
		Marka Jalan	5137	m2	5137			5137		6137		7137		8137		9137			
		Pagar Pengaman Jalan	139	buah	151			151		163		175		187		199			
		Rambu Jalan	1374	buah	1474			1524		1624		1724		1824		1924			
		Patok Tikungan	206	buah	206			206		206		206		206		206			
		Traffic Cone	45	buah	45			45		95		95		95		95			
		Cermin Tikungan	4	buah	4			4		14		14		24		29			

Tujuan	Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	Satuan	Target Kinerja Program, dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026						
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
		Road Barrier	90	buah	90		90		90		90		90		90		90		90		
		Rambu Penutup dan Pengalih Arus	34	buah	34		34		34		34		34		34		34		34		
		ATCS (Area Traffic Control System)	0	titik	0		5		10		10		10		10		10		10		
		Penerangan Jalan Umum (PJU)	2000	unit	2000		3000		4000		5000		6000		7000		7000		7000		
	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Fasilitas Keselamatan Jalan yang Terpelihara	2007	unit	2007	110.800	3012	180.800												dishub	
		Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2007	unit					4013	190.800	5014	200.800	6015	210.800	7015	220.800	7015	7015		dishub	
		Jumlah Traffic Light yang	7	unit	7		12		13		14		15		15		15		15		
		Jumlah PJU yang Terpelihara	2000	unit	2000		3000		4000		5000		6000		7000		7000		7000		
	Kegiatan Pengelolaan Terminal Tipe C	Persentase Sarana dan Prasarana Terminal yang Tersedia	35,29	%	35,29	-	37,25	168.000	39,22	184.800	43,14	100.000	47,06	100.000	50,98	100.000	50,98	50,98	Dishub	Terminal Mujur	
	Sub Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Fasilitas Utama, Fasilitas Penunjang, dan Fasilitas Umum Terminal yang Tersedia	18	item	18	-	19	168.000												Terminal Mujur	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	18	unit					20	184.800	22	100.000	24	100.000	26	100.000	26	100.000	26	Terminal Mujur	
	Kegiatan Penerbitan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Lokasi Parkir yang Tergarap	40,00	%	50,91	207.447	61,82	274.100	72,73	301.510	83,64	301.510	94,55	301.510	100,00	301.510	100,00	301.510	100,00	Dishub	Kab. Lombok Tengah
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Parkir yang Tergarap	22	lokasi	28	207.447	34	274.100												Kab. Lombok Tengah	
		Jumlah Penerbitan Parkir yang Dilaksanakan	132	kali	264		396													Kab. Lombok Tengah	
		Jumlah Gembok Parkir yang Tersedia	n/a	buah	-		-													Kab. Lombok Tengah	

Tujuan	Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	Satuan	Target Kinerja Program, dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a	laporan					12	301.510	24	301.510	36	301.510	40	301.510	40		Kab. Lombok Tengah
	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan yang Laik Jalan	91,73	%	95	1.358.023	96	747.100	97	821.810	98	903.991	99	994.390	100	1.093.829	100	Dishub	Kab. Lombok Tengah
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Alat Uji Kendaraan Bermotor yang Tersedia	6	unit	6	796.709	6	-									10		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	6	unit					7	500.000	8	450.000	9		10		10		UPTD PKB
	Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor yang Tersedia	n/a	buah	5.500	137.500	12.938	355.795											UPTD PKB
		Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	n/a	dok					20.622	618.660	28.510	926.575	36.698	1.284.430	45.156	1.693.350	45.156		UPTD PKB
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Alat Pengujian Kendaraan Bermotor yang Terkalibrasi	6	unit	6	6.000	6	6.000											
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	6	unit					6		7		8		9		9		UPTD PKB

Tujuan	Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	Satuan	Target Kinerja Program, dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan	20	%	20	85.585	20	175.000	40	150.000	60	165.000	80	181.500	100	199.650	100	Dishub	Kab. Lombok Tengah	
	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan	1	lokasi															Batuson, Wilayah Perkotaan, dan ODW	
		Jumlah Dokumen Kajian Manajemen Rekayasa Lalu Lintas yang Tersusun	n/a	dok																Kab. Lombok Tengah
		Operasional Forum LLAJ	12	bln	12		12													Kab. Lombok Tengah
		Jumlah Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan	n/a	kali			1													Dishub
		Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	n/a	laporan			12	150.000	24	165.000	36	181.500	48	199.650	48	199.650	48			Kab. Lombok Tengah
	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Kepatuhan Pengguna Jalan dalam Berlalu Lintas	68	%	70	139.790	72	114.000	74	125.400	76	137.940	78	151.734	80	166.907	80	Dishub	Kab. Lombok Tengah	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Penertiban Lalu Lintas yang Dilaksanakan	240	kali	240		480												Kab. Lombok Tengah	
		Jumlah Sosialisasi Keselamatan Berlalu Lintas yang Dilaksanakan	6	kali	6		6													Kab. Lombok Tengah

Tujuan	Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	Satuan	Target Kinerja Program, dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi					
					2021		2022		2023		2024		2025		2026									
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)					
		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	n/a	laporan					12	125.400		24	137.940		36	151.734		48	166.907		48		Kab. Lombok Tengah	
	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Trayek Angkutan Umum yang Dinormalisasi	n/a	%	-	2.334.846	14	250.000	36	275.000	57	200.000	79	220.000	100	242.000		100			100	Dishub	Kab. Lombok Tengah	
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Umum yang Dilaksanakan	96	kali	96		192																Kab. Lombok Tengah	
Jumlah Sosialisasi Angkutan Umum yang Dilaksanakan		6	kali	6		6																	Kab. Lombok Tengah	
Jumlah Survey Statis-Dinamis yang dilaksanakan (Pemutakhiran Data Angkutan Umum)		1	kali	1		2																	Kab. Lombok Tengah	
Jumlah Dokumen Kajian Trayek Perdesaan dan Trayek Perkotaan yang Tersusun		n/a	dok																					Kab. Lombok Tengah
Operasional Trayek Rintisan Perkotaan		n/a	paket																					Kab. Lombok Tengah

Tujuan	Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	Satuan	Target Kinerja Program, dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi					
					2021		2022		2023		2024		2025		2026									
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)					
		Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		laporan					12	275.000		24	200.000		36	220.000		48	242.000		48		Kab. Lombok Tengah	
	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Penerbitan PAS Kecil Angkutan Laut	n/a	%	-	86.999	20	170.780	40	270.780	60	187.858	80	206.644	100	227.308		100			100		Dishub	Kab. Lombok Tengah
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan PAS Kecil Angkutan Laut	n/a	%	-	86.999	20	170.780	40	270.780	60	187.858	80	206.644	100	227.308		500					Dishub	Kab. Lombok Tengah
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan PAS kecil Angkutan Laut	n/a	buah	-	-	100																Kab. Lombok Tengah	
		Jumlah Bimtek Kru Kapal yang Dilaksanakan	n/a	kali																			Kab. Lombok Tengah	
		Jumlah Dokumen Kajian Perairan yang Tersusun	n/a	dok																			Kab. Lombok Tengah	
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota		laporan					12	270.780		24	187.858		36	206.644		48		227.308		48		Kab. Lombok Tengah

Tujuan	Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	Satuan	Target Kinerja Program, dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	C	Poin	B	5.307.405	B	6.109.449	B	6.448.491	B	7.093.340	B	7.802.674	BB	8.582.942	BB	Dishub	Praya
	Kegiatan Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase IKU OPD yang Tercapai	100	%	100	41.345	100	45.480	100	50.027	100	55.030	100	60.533	100	66.587	100	Dishub	Praya
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun	5	dok	5		5												Kab. Lombok Tengah
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	dok					4		4			4		5		5	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja yang Tersusun	30	dok	30		30												Kab. Lombok Tengah
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30	laporan					30		30			30		30		30	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Keuangan OPD yang ditindaklanjuti	100	%	100	4.126.648	100	4.539.313	100	4.993.244	100	5.492.568	100	6.041.825	100	6.646.007	100	Dishub	Praya
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Terbayar Gaji dan Tunjangan	43	orang	43		43												Kab. Lombok Tengah
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		orang/ bulan					43		43			43		43		43	

Tujuan	Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	Satuan	Target Kinerja Program, dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Tersusun	15	dok	15		30													Kab. Lombok Tengah
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		laporan				45		60			75		90			90		
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Validasi Data Aset OPD	100	%	100	-	100	11.008	100	12.109	100	13.319	100	14.651	100	16.117	100	100	Dishub	Praya
	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Aset OPD yang Tersusun	5	dok	5		10													Kab. Lombok Tengah
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD						15		20			25		30			30		
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM dengan Capaian Kinerja Lebih dari 80%	100	%	100	80.158	100	200.000	100	220.000	100	242.000	100	266.200	100	292.820	100	100	Dishub	Praya
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan yang Tersedia	n/a	stel																Kab. Lombok Tengah
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		paket				150		150			300		300			300		
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Kepegawaian yang Tersusun	15	dok	15		30													Kab. Lombok Tengah
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						45		60			75		90			90		

Tujuan	Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	Satuan	Target Kinerja Program, dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026						
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Teknis	n/a	orang	2		2													Kab. Lombok Tengah	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Diklat Pegawai	n/a	dokumen	2		2														
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	n/a	orang					5		8			11		14			14		
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Pekerjaan sesuai SOP	100	%	100	362.857	100	434.630	100	478.093	100	525.902	100	578.492	100	636.342	100	Dishub	Praya			
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia	194	unit	201		203													Kab. Lombok Tengah	
		Laptop	12	unit	15		15														
		Printer	16	unit	19		21														
		Meja Kerja	73	buah	74		74														
		Kursi Kerja	79	buah	79		79														
		Lemari Arsip	14	buah	14		14														
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan dan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman yang Disediakan untuk Kepentingan Rapat dan Tamu Dinas	1000	ok	1.000		2.000													Kab. Lombok Tengah	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		paket					1		1			1		1			1		

Tujuan	Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	Satuan	Target Kinerja Program, dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi yang Diikuti	45	dok	27		55													Kab. Lombok Tengah
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45	laporan				85		105		135		165		165				
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Validasi Data Aset OPD	100	%	100	315.089	100	429.002	100	200.000	100	220.000	100	242.000	100	266.200	100	100	Dishub	Praya
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Tersedia	48	unit	48		48													Kab. Lombok Tengah
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	48	unit				49		50		51		52		52				
	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Terbangun	2	unit	2		2													Kab. Lombok Tengah
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	unit				3		3		4		4		4				
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Terbangun	n/a	unit	1		1													Kab. Lombok Tengah
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	n/a	unit				2		3		4		5		5				

Tujuan	Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	Satuan	Target Kinerja Program, dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026						
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
	Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyelesaian Pekerjaan sesuai SOP dan Tepat Waktu	100	%	100	130.616	100	143.678	100	158.046	100	173.850	100	191.235	100	210.359	100	Dishub	Praya		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan Internet	6200	Mbps	11.000		25.400													Kab. Lombok Tengah	
		Layanan Air	1500	m ³	925		1.925														Kab. Lombok Tengah
		Layanan Listrik	18600	kwh	41.000		82.000														Kab. Lombok Tengah
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan				12	158.046	24	173.850	36	191.235	48	210.359	48					Kab. Lombok Tengah
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Layanan Umum Kantor	12	bulan	12		24													Kab. Lombok Tengah	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		laporan				12		24		36		48		48					Kab. Lombok Tengah
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Kondisi Baik	100	%	100	250.692	100	306.339	100	336.973	100	370.670	100	407.737	100	448.511	100	Dishub	Praya		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	48	unit	48		48													Kab. Lombok Tengah	
		Jumlah STNK Kendaraan Dinas yang diperbarui	48	unit	48		48														Kab. Lombok Tengah

Tujuan	Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	Satuan	Target Kinerja Program, dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48	unit					48			49		50		51		51	51	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara	2	kali	2		2													Kab. Lombok Tengah
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2	unit					3		4		5		6		6		6	

Praya, 8 September 2021

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lombok Tengah,



N. SUPARDAN, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19691122 199302 1 004

BAB VII**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2021- 2026 adalah sebagaimana tersusun dalam Tabel 7.1.

Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Tabel 7.1.

Perumusan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	Jumlah Daerah Rawan Kecelakaan - (<i>titik</i>)	n/a	100	98	96	94	92	92
2	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (VC Rasio) – (<i>poim</i>)	0,35	0,34	0,33	0,32	0,31	0,30	0,30
3	Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan - (%)	43,91	48,00	55,96	64,20	72,44	79,90	79,90
4	Persentase Penerbitan PAS Kecil Angkutan Laut – (%)	n/a	20	40	60	80	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021–2026 akan digunakan sebagai acuan atau panduan bagi seluruh unsur organisasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Seluruh rangkaian aktivitas yang tertuang dalam Renstra ini merupakan upaya menggali berbagai potensi sumber daya yang ada dan memperkuat tujuan pencapaian Visi Kabupaten Lombok Tengah. Dengan telah disepakatinya Renstra ini, maka untuk menjamin keberhasilan dalam pelaksanaannya perlu segera melaksanakan konsolidasi ke dalam sehingga timbul persepsi yang sama dalam mengaktualisasikan pada bidang tugas masing-masing.

Rencana strategis ini diharapkan mampu memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi atau kemungkinan yang akan muncul dikemudian hari, oleh karenanya komitmen semua jajaran harus dijunjung tinggi agar tujuan akhir dalam rangka mendukung mewujudkan masyarakat Kabupaten Lombok Tengah yang BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA).

Praya, 8 September 2021

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lombok Tengah,



H. SUPARDAN, S.sos.,M.si

Pemimpin Utama Muda (IV/c)

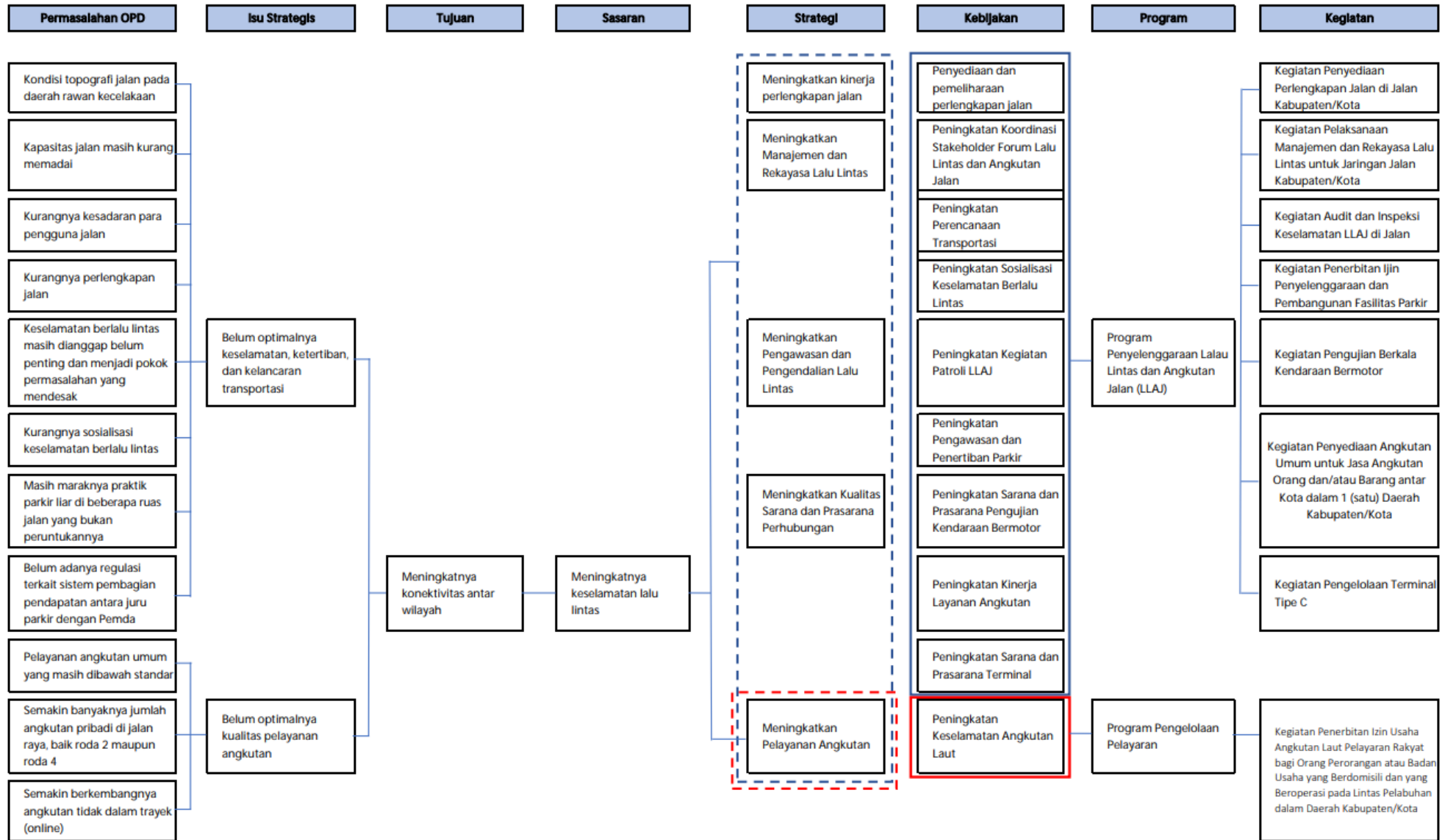
NIP. 19691122 199203 1 003

LAMPIRAN

Bagan Alir Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

Tahun 2021 - 2026

Bagan Alir Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 - 2026



DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

RENSTRA
